



JPKN: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Nusantara

<https://dinastires.org/JPKN> dinasti.info@gmail.com [+62 811 7404 455](tel:+628117404455)

E-ISSN: 2963-0746
P-ISSN: 2963-0738

DOI: <https://doi.org/10.38035/jpkn>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Partisipasi Perempuan dalam Pendidikan Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Sekolah Perempuan di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang

Sonia Suhatman¹, Alfian Miko², Indraddin³.

¹Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, Indonesia, soniasuhatman@gmail.com.

²Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

³Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Corresponding Author: soniasuhatman@gmail.com¹

Abstract: *Women's participation constitutes a fundamental element in determining the effectiveness of community empowerment initiatives, although its implementation continues to be constrained by patriarchal social structures that restrict women's involvement in decision-making processes. This study examines women's participation in the Women's School Program in Lubuk Kilangan District, Padang City, with particular attention to the role of the Pembangkit Batang Tarandam (PBT) Non-Governmental Organization (NGO) while identifying the factors that facilitate and hinder members' participation. A qualitative descriptive approach was employed to obtain a comprehensive understanding of the participation dynamics within the program. Data were collected through in-depth interviews with the Director of PBT, Women's School members, and representatives of the Forum Nagari, supported by document analysis. Data were analyzed inductively using Arnstein's Ladder of Citizen Participation Theory and James S. Coleman's Rational Choice Theory. The findings indicate that PBT performs strategic functions as the program initiator, facilitator of participatory learning, promoter of inclusive social cohesion, mentor treating participants as equal partners, policy advocate, and catalyst for women's empowerment. These roles enabled women's participation to reach the Citizen Control level, reflecting the group's capacity to manage program activities independently. Members were primarily motivated by opportunities for self-development, social networking, and economic improvement. Nevertheless, participation remained constrained by internal barriers, including low self-confidence, external barriers such as multiple domestic responsibilities and social stigma, and structural barriers associated with limited support from local government. The findings further reveal that local government practices remain characterized by Tokenism and Non-Participation, limiting meaningful power-sharing despite organizational efforts to transform participation.*

Keyword: *Empowerment, NGO PBT, Sekolah Perempuan, Women's Participation*

Abstrak: Partisipasi perempuan merupakan unsur penting dalam menentukan keberhasilan berbagai program pemberdayaan masyarakat, meskipun pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh kuatnya budaya patriarki yang membatasi ruang keterlibatan perempuan. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk partisipasi perempuan dalam Program Sekolah Perempuan di Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, dengan menitikberatkan pada peran LSM Pembangkit Batang Tarandam (PBT), sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keterlibatan anggotanya. Penelitian menerapkan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif guna memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai dinamika partisipasi perempuan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Direktur LSM PBT, anggota Sekolah Perempuan, dan perwakilan Forum Nagari, *serta dilengkapi melalui studi dokumentasi*. Analisis data dilakukan secara induktif menggunakan Teori Tangga Partisipasi yang dikembangkan oleh Sherry R. Arnstein dan Teori Pilihan Rasional dari James S. Coleman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LSM PBT berperan sebagai penggagas program, fasilitator pembelajaran partisipatif, penguat kohesi sosial yang inklusif, pendamping yang menempatkan anggota sebagai mitra setara, advokator kebijakan, sekaligus penggerak kemandirian perempuan. Peran tersebut mampu mendorong partisipasi perempuan hingga mencapai tingkat Kendali Warga, yang ditandai dengan kemampuan kelompok menjalankan program secara mandiri. Motivasi anggota mencakup pengembangan kapasitas diri, perluasan jaringan sosial, dan peningkatan kesejahteraan ekonomi. Sebaliknya, partisipasi masih dihadapkan pada hambatan internal berupa rasa kurang percaya diri, hambatan eksternal berupa beban ganda dan stigma sosial, serta hambatan struktural akibat terbatasnya dukungan pemerintah daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah lokal masih berada pada praktik Tokenisme dan Non-Partisipasi sehingga proses berbagi kendali belum sepenuhnya terwujud.

Kata Kunci: LSM PBT, Partisipasi Perempuan, Pemberdayaan, Sekolah Perempuan.

PENDAHULUAN

Pembangunan pada dasarnya tidak semata-mata diarahkan pada penyediaan infrastruktur, pembangunan gedung, maupun berbagai fasilitas publik, tetapi juga menempatkan pengembangan kapasitas manusia sebagai elemen yang menentukan keberhasilan proses pembangunan (Adebayo & Butcher, 2022). Dalam kerangka tersebut, pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu pendekatan yang memiliki peran strategis karena bertujuan meningkatkan kapasitas, kemandirian, serta posisi tawar masyarakat agar mampu berpartisipasi secara aktif dalam menentukan arah pembangunan dan kehidupan mereka sendiri (Perwirawati et al., 2022). Pemberdayaan masyarakat dipandang sebagai suatu proses yang memperkuat kapasitas individu maupun kelompok sehingga mereka memiliki akses, kendali, dan kemampuan untuk mengelola serta memanfaatkan berbagai sumber daya sosial, ekonomi, maupun politik secara mandiri dan berkelanjutan (Ramli et al., 2023). Dalam konteks tersebut, masyarakat tidak lagi dipandang hanya sebagai pihak yang menerima hasil pembangunan, tetapi juga sebagai aktor utama yang memiliki hak, ruang, dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam setiap tahapan penyelenggaraan pembangunan, mulai dari proses perencanaan hingga evaluasi pelaksanaannya (Dushkova & Ivlieva, 2024).

Pentingnya pemberdayaan masyarakat semakin terlihat karena masih terdapat berbagai kelompok masyarakat yang menghadapi kerentanan akibat kemiskinan, ketertinggalan, ketimpangan sosial, serta terbatasnya akses terhadap proses pengambilan keputusan. Kondisi tersebut sejalan dengan temuan yang memperlihatkan bahwa hingga tahun 2021 seluruh 24 kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia masih berstatus sebagai daerah tertinggal, sehingga menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan masih berkaitan erat dengan ketimpangan pembangunan antarwilayah (Zirtana et al., 2025). Situasi ini mengakibatkan sebagian masyarakat mengalami keterbatasan dalam mengendalikan kehidupannya sendiri

karena adanya eksklusi sosial serta rendahnya daya berdaya di dalam komunitas (Walters et al., 2023). Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat menjadi instrumen yang penting untuk menumbuhkan kesadaran kritis terhadap potensi yang dimiliki sekaligus memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengatasi berbagai persoalan sosial secara mandiri (Najamudin & Al Fajar, 2024). Dalam praktiknya, keberhasilan suatu program pemberdayaan tidak semata-mata diukur dari capaian fisik maupun besarnya bantuan yang diberikan, melainkan juga ditentukan oleh sejauh mana masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap tahapan program, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi, sehingga dapat mendorong terwujudnya perubahan sosial yang berkelanjutan (Nafisyah & Nugraheni, 2024).

Meskipun konsep partisipasi telah menjadi prinsip utama dalam pembangunan partisipatif, berbagai program pemberdayaan pada kenyataannya masih menunjukkan kecenderungan top-down yang mendominasi implementasi kebijakan pembangunan daerah di Indonesia sehingga mengabaikan kondisi lokal dan aktor masyarakat (Muminah & Suprajogo, 2025). Masyarakat seringkali hanya dilibatkan pada tahap formalitas, seperti menghadiri sosialisasi atau kegiatan seremonial, tanpa memiliki ruang yang memadai untuk menyampaikan aspirasi dan menentukan arah program, sebagaimana terlihat dalam penerapan program pemberdayaan masyarakat yang kurang melibatkan partisipasi aktif dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya (Cholifah, 2025). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat masih berada pada tingkat *pseudo-participation* dan belum sepenuhnya memberikan ruang bagi masyarakat sebagai aktor utama dalam proses pembangunan, khususnya pada pengembangan desa wisata yang masih didominasi oleh pendekatan programatik dengan penekanan pada pembangunan infrastruktur fisik dibandingkan penguatan kemandirian komunitas, sehingga berpotensi memunculkan partisipasi yang bersifat semu (Marsuki et al., 2026). Kondisi tersebut semakin kompleks ketika dikaitkan dengan kelompok perempuan yang secara sosial masih menghadapi berbagai bentuk ketidaksetaraan, di mana partisipasi mereka seringkali bersifat tokenistik meskipun terdapat representasi numerik yang signifikan dalam pengelolaan sumber daya alam seperti hutan komunitas (Baral et al., 2024).

Perempuan hingga saat ini masih menjadi kelompok yang menghadapi berbagai bentuk marginalisasi dalam proses pembangunan, yang tidak terlepas dari kuatnya budaya patriarki sebagai sistem sosial yang menempatkan laki-laki pada posisi yang lebih dominan dibandingkan perempuan. Dalam konstruksi sosial tersebut, perempuan umumnya dipandang memiliki tanggung jawab utama pada ranah domestik, seperti mengelola rumah tangga dan mengasuh anak, sehingga kesempatan mereka untuk berpartisipasi dalam ruang publik maupun proses pengambilan keputusan menjadi lebih terbatas. Ketimpangan ini semakin diperkuat oleh praktik diskriminasi gender yang diwujudkan dalam berbagai bentuk, antara lain marginalisasi, subordinasi, pelabelan atau stereotip negatif, beban kerja ganda, hingga kekerasan berbasis gender. Di sisi lain, dinamika sosial dan ekonomi menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran yang semakin penting dalam menopang perekonomian keluarga, terutama bagi mereka yang berstatus sebagai kepala keluarga, janda, maupun berasal dari rumah tangga dengan tingkat kerentanan ekonomi yang relatif tinggi.

Tuntutan agar perempuan mampu mencapai kemandirian ekonomi pada kenyataannya belum sepenuhnya didukung oleh akses yang setara terhadap pendidikan, sumber daya ekonomi, pelatihan, maupun jejaring sosial. Keterbatasan tersebut berdampak pada rendahnya peluang perempuan untuk mengembangkan kapasitas, kompetensi, dan potensi yang dimiliki secara optimal. Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG), yang menegaskan pentingnya mengintegrasikan perspektif gender ke dalam setiap tahapan proses pembangunan. Kebijakan tersebut menjadi pijakan bagi pelaksanaan berbagai program pemberdayaan perempuan yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kapasitas, serta memperluas partisipasi perempuan dalam pembangunan di berbagai sektor.

Salah satu implementasi pemberdayaan perempuan pada tingkat komunitas diwujudkan melalui Program Sekolah Perempuan yang dikembangkan oleh KAPAL Perempuan. Program pendidikan nonformal ini bertujuan membangun kesadaran kritis, memperkuat kapasitas kepemimpinan, meningkatkan kecakapan hidup, serta mendorong partisipasi aktif perempuan dalam mewujudkan perubahan sosial (Misiyah & Kalsum, 2017; Septiani, 2015). Sekolah Perempuan dirancang sebagai ruang belajar alternatif yang memungkinkan perempuan saling berbagi pengalaman, memahami berbagai persoalan sosial yang mereka hadapi, sekaligus mengembangkan kemampuan untuk menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan kepentingannya di ruang publik. Materi pembelajaran yang disampaikan meliputi kesetaraan gender, kesehatan reproduksi, penguatan ekonomi keluarga, serta pengembangan keterampilan komunikasi dan advokasi sosial. Melalui pendekatan pembelajaran yang bersifat partisipatif, Sekolah Perempuan diharapkan mampu mendorong transformasi perempuan dari kelompok yang sebelumnya cenderung pasif menjadi individu yang memiliki kapasitas sebagai agen perubahan sosial di lingkungan komunitasnya.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa program pemberdayaan perempuan melalui pendidikan nonformal memiliki kontribusi positif terhadap peningkatan kapasitas perempuan. Penelitian Septiani (2015) menunjukkan bahwa Sekolah Perempuan mampu meningkatkan kesadaran kritis perempuan terhadap ketidakadilan gender dan memperkuat keberanian mereka untuk terlibat dalam ruang publik. Penelitian Misiyah & Kalsum (2017) juga menegaskan bahwa Sekolah Perempuan berperan dalam membangun kepemimpinan perempuan akar rumput melalui proses pembelajaran partisipatif. Sementara itu, Mustanir et al., (2025) menjelaskan bahwa hambatan budaya patriarki masih menjadi faktor dominan yang membatasi partisipasi perempuan dalam pembangunan. Namun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti dampak pemberdayaan terhadap peningkatan kapasitas perempuan, sedangkan kajian mengenai proses terbentuknya partisipasi perempuan, khususnya peran lembaga pendamping dalam membangun partisipasi tersebut, masih relatif terbatas.

Berdasarkan hasil telaah terhadap berbagai penelitian terdahulu, kebaruan ilmiah dalam penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap dinamika partisipasi perempuan dalam Program Sekolah Perempuan dengan menempatkan peran lembaga pendamping sebagai fokus utama kajian. Penelitian ini tidak hanya menelaah capaian pemberdayaan perempuan sebagai luaran program, tetapi juga mengkaji proses terbentuk, terpelihara, dan berkembangnya partisipasi perempuan melalui mekanisme pendampingan sosial yang dijalankan oleh lembaga swadaya masyarakat. Selain itu, penelitian ini turut mengidentifikasi motivasi yang mendorong perempuan untuk terlibat dalam program serta berbagai hambatan yang mereka hadapi selama mengikuti rangkaian kegiatan pemberdayaan.

Penelitian ini dilaksanakan pada Program Sekolah Perempuan yang berada di Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Program tersebut diimplementasikan di tiga kelurahan, yaitu Kelurahan Baringin, Kelurahan Tarantang, dan Kelurahan Batu Gadang, yang masing-masing mengembangkan bentuk pemberdayaan ekonomi sesuai dengan potensi wilayahnya. Di Kelurahan Baringin, kegiatan pemberdayaan difokuskan pada pengembangan usaha budidaya jamur tiram, sedangkan Kelurahan Tarantang mengembangkan usaha penggemukan sapi. Sementara itu, Kelurahan Batu Gadang memusatkan kegiatan pemberdayaan pada pengembangan sektor pertanian padi. Meskipun ketiga kelompok berada dalam wilayah kecamatan yang sama serta memperoleh pendampingan dari lembaga yang sama, karakteristik dan dinamika partisipasi yang ditunjukkan oleh masing-masing kelompok memperlihatkan perbedaan. Dalam konteks tersebut, peran LSM Pembangkit Batang Tarandam (PBT) sebagai lembaga pendamping menjadi penting untuk dikaji karena lembaga ini berperan dalam memfasilitasi proses pemberdayaan sekaligus memperkuat partisipasi perempuan di tingkat komunitas.

Kebaruan teoretis dalam penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan hibrida yang memadukan Teori Tangga Partisipasi yang diperkenalkan oleh Sherry R. Arnstein dengan Teori Pilihan Rasional yang dikembangkan oleh James S. Coleman. Integrasi kedua perspektif tersebut menawarkan sudut pandang analitis yang relatif belum banyak digunakan dalam penelitian sebelumnya. Teori Arnstein dimanfaatkan untuk menganalisis posisi struktural perempuan serta tingkat pembagian kekuasaan (*power sharing*) dalam proses pengambilan keputusan, sedangkan Teori Coleman digunakan untuk mengkaji pertimbangan rasional pada tingkat individu, perubahan struktur insentif, serta upaya maksimalisasi utilitas yang dilakukan oleh perempuan sebagai aktor di tingkat akar rumput dalam merespons intervensi kelembagaan yang diberikan oleh LSM PBT.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis mengenai bagaimana partisipasi perempuan terbentuk dan berkembang dalam Program Sekolah Perempuan di Kecamatan Lubuk Kilangan, bagaimana peran LSM Pembangkit Batang Tarandam dalam mendorong peningkatan partisipasi perempuan, serta berbagai faktor motivasi dan hambatan yang memengaruhi keterlibatan perempuan selama mengikuti program tersebut. Selaras dengan fokus tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran LSM Pembangkit Batang Tarandam dalam meningkatkan partisipasi perempuan pada Program Sekolah Perempuan di Kecamatan Lubuk Kilangan, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang memotivasi serta berbagai kendala yang memengaruhi partisipasi perempuan dalam proses pemberdayaan.

METODE

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma definisi sosial (*social definition paradigm*) yang berakar pada pemikiran Max Weber. Paradigma ini menekankan bahwa realitas sosial dibentuk melalui pemaknaan subjektif individu terhadap tindakan sosial yang mereka lakukan. Dalam konteks penelitian ini, partisipasi perempuan dipahami bukan sekadar keterlibatan administratif dalam program pemberdayaan, melainkan sebagai tindakan sosial yang memiliki motif, makna, pengalaman, dan tujuan tertentu bagi para pelakunya. Paradigma definisi sosial dipilih karena penelitian ini berfokus untuk memahami pengalaman subjektif anggota Sekolah Perempuan, pengurus LSM Pembangkit Batang Tarandam (PBT), serta Forum Nagari Kecamatan Lubuk Kilangan dalam proses pemberdayaan perempuan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk mengkaji fenomena yang menjadi fokus penelitian. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pengalaman sosial, motivasi, serta dinamika partisipasi perempuan yang terlibat dalam Program Sekolah Perempuan. Menurut Afrizal (2016), metode kualitatif memungkinkan peneliti memahami suatu fenomena sosial melalui perspektif individu yang mengalami sekaligus memaknai pengalaman tersebut secara langsung. Atas dasar itu, penelitian deskriptif ini diarahkan untuk menyajikan gambaran yang sistematis berdasarkan temuan empiris di lapangan mengenai peran LSM PBT dalam meningkatkan partisipasi perempuan, sekaligus mengidentifikasi berbagai faktor yang memotivasi serta hambatan yang dihadapi anggota Sekolah Perempuan di Kecamatan Lubuk Kilangan.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, tepatnya pada tiga kelurahan yang menjadi lokasi Program Sekolah Perempuan, yaitu Kelurahan Baringin, Kelurahan Tarantang, dan Kelurahan Batu Gadang. Ketiga wilayah tersebut dipilih karena memiliki karakteristik program pemberdayaan ekonomi perempuan yang berbeda, seperti budidaya jamur tiram, penggemukan sapi, dan pertanian padi. Perbedaan karakteristik program tersebut memungkinkan peneliti memperoleh variasi pengalaman dan dinamika partisipasi perempuan dalam kegiatan pemberdayaan.

Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan mempertimbangkan tingkat relevansi serta kesesuaiannya terhadap tujuan dan fokus penelitian yang dikaji (Afrizal, 2016). Informan dikelompokkan ke dalam dua kategori, yakni informan pelaku dan informan pengamat. Informan pelaku terdiri atas pengurus LSM PBT bersama anggota Sekolah Perempuan yang berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan pemberdayaan. Kriteria penentuan informan pelaku meliputi keterlibatan langsung dalam implementasi program, keikutsertaan aktif dalam kegiatan Sekolah Perempuan sekurang-kurangnya selama enam bulan terakhir, serta kemampuan menyampaikan informasi secara komprehensif berdasarkan pengalaman partisipasi yang dimiliki. Sementara itu, informan pengamat berasal dari pengurus Forum Nagari Kecamatan Lubuk Kilangan yang memahami proses dan dinamika penyelenggaraan Program Sekolah Perempuan, meskipun tidak berperan sebagai pelaksana utama dalam program tersebut. Jumlah informan tidak ditetapkan secara pasti pada tahap awal penelitian, tetapi disesuaikan dengan prinsip data saturation (kejenuhan data), yaitu pengumpulan data dihentikan ketika informasi yang diperoleh telah menunjukkan pola yang berulang dan tidak lagi menghasilkan temuan baru yang relevan.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari para informan melalui proses interaksi antara peneliti dan informan, terutama untuk menggali informasi mengenai pengalaman perempuan dalam berpartisipasi, peran LSM PBT selama proses pendampingan, motivasi mengikuti program, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui penelaahan berbagai dokumen dan sumber literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Dokumen tersebut meliputi modul pembelajaran Sekolah Perempuan, daftar kehadiran peserta, laporan kegiatan, dokumentasi program, serta berbagai referensi ilmiah yang membahas pemberdayaan perempuan.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan semi-terstruktur sehingga peneliti memiliki fleksibilitas untuk mengeksplorasi informasi secara lebih mendalam sesuai dengan dinamika yang muncul selama proses wawancara. Sebelum wawancara dilaksanakan, peneliti menyusun pedoman wawancara berdasarkan fokus penelitian, kemudian mengembangkan pertanyaan lanjutan sesuai dengan respons yang diberikan oleh informan. Seluruh wawancara dilakukan secara tatap muka di lokasi yang telah disepakati bersama, dengan memanfaatkan alat perekam dan catatan lapangan sebagai sarana untuk mendokumentasikan seluruh informasi yang diperoleh. Selain wawancara, penelitian ini juga memanfaatkan studi dokumentasi sebagai upaya memperkuat temuan empiris. Dokumen yang dianalisis mencakup modul pembelajaran, laporan kegiatan, dokumentasi foto, daftar kehadiran anggota, serta berbagai arsip yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Sekolah Perempuan.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, yang mencakup tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pada tahap reduksi data, peneliti melakukan proses pengodean terhadap hasil wawancara dan dokumentasi dengan mengelompokkan berbagai informasi ke dalam tema-tema yang selaras dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif agar

hubungan antarkategori dapat dipahami secara lebih sistematis dan komprehensif. Tahap berikutnya dilakukan melalui penarikan kesimpulan dan proses verifikasi yang berlangsung secara berkesinambungan selama penelitian dilaksanakan guna memastikan konsistensi sekaligus validitas data yang diperoleh. Dengan menerapkan teknik analisis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai partisipasi perempuan dalam Program Sekolah Perempuan di Kecamatan Lubuk Kilangan.

Secara teknis, integrasi kerangka teoretis pada tahap reduksi data interaktif dilakukan melalui metode pengodean tematik terarah (*directed thematic coding*). Konsep tingkatan partisipasi dari Teori Tangga Partisipasi Arnstein (non-partisipasi, tokenisme, hingga kendali warga) dioperasionalkan sebagai kriteria pengodean untuk mengategorisasikan data empiris terkait derajat keterlibatan dan pembagian kekuasaan aktor perempuan dalam program. Sementara itu, elemen-elemen dari Teori Pilihan Rasional Coleman, yang meliputi konsepsi aktor (*agents*), sumber daya (*resources*), kepentingan (*interests*), kontrol (*control*), serta optimalisasi utilitas, digunakan sebagai basis pengodean untuk menganalisis basis motivasi internal, perubahan struktur insentif, serta kalkulasi rasional perempuan dalam mengatasi hambatan struktural yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi Perempuan dalam Program Sekolah Perempuan di Kecamatan Lubuk Kilangan

Program Sekolah Perempuan di Kecamatan Lubuk Kilangan merupakan salah satu bentuk inisiatif pemberdayaan berbasis komunitas yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas sosial, ekonomi, serta kesadaran kritis perempuan. Pelaksanaan program ini mencakup tiga kelurahan, yaitu Kelurahan Baringin, Kelurahan Tarantang, dan Kelurahan Batu Gadang, dengan karakteristik kegiatan pemberdayaan ekonomi yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi masing-masing wilayah. Di Kelurahan Baringin, kegiatan difokuskan pada pengembangan budidaya jamur tiram, sementara Kelurahan Tarantang mengembangkan usaha penggemukan sapi. Adapun di Kelurahan Batu Gadang, program pemberdayaan diarahkan pada sektor pertanian padi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam Program Sekolah Perempuan tidak hanya tercermin dari kehadiran mereka dalam kegiatan rutin, tetapi juga terlihat melalui keterlibatan aktif dalam proses diskusi, pengambilan keputusan, pelaksanaan berbagai aktivitas ekonomi produktif, serta evaluasi terhadap pelaksanaan program. Bentuk partisipasi tersebut berkembang melalui proses pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh LSM Pembangkit Batang Tarandam (PBT) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mendampingi pelaksanaan program.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar anggota Sekolah Perempuan aktif mengikuti kegiatan pembelajaran bulanan yang membahas isu kesetaraan gender, kesehatan reproduksi, pengelolaan ekonomi keluarga, hingga penguatan kapasitas kepemimpinan perempuan. Keaktifan tersebut terlihat dari tingkat kehadiran anggota yang relatif konsisten pada setiap pertemuan kelompok. Selain itu, anggota juga mulai berani menyampaikan pendapat dalam forum diskusi serta terlibat dalam proses perencanaan kegiatan kelompok.

Partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi produktif juga mengalami peningkatan. Pada kelompok Sekolah Perempuan Baringin, anggota terlibat aktif dalam proses budidaya jamur tiram mulai dari persiapan media tanam, perawatan, hingga pemasaran hasil panen. Di Kelurahan Tarantang, perempuan terlibat dalam pengelolaan kegiatan penggemukan sapi, sedangkan di Kelurahan Batu Gadang perempuan mulai berpartisipasi dalam kegiatan pertanian padi yang sebelumnya lebih banyak didominasi laki-laki. Selain keterlibatan dalam aktivitas ekonomi, perubahan partisipasi juga terlihat pada keberanian perempuan untuk terlibat dalam ruang publik. Sebagian anggota mulai aktif mengikuti musyawarah lingkungan, kegiatan Forum Nagari, dan kegiatan sosial masyarakat lainnya. Perubahan tersebut menunjukkan

bahwa Program Sekolah Perempuan tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kepercayaan diri dan kapasitas sosial perempuan.

Tabel 1. Matriks Perbandingan Dinamika Partisipasi, Motivasi, dan Hambatan Perempuan di Kecamatan Lubuk Kilangan

Kriteria Analisis	Kelurahan Baringin	Kelurahan Tarantang	Kelurahan Batu Gadang
Sektor Utama Pemberdayaan	Budidaya Jamur Tiram	Penggemukan Sapi	Pertanian Padi
Tingkat Partisipasi (Arnstein)	Citizen Control (Tinggi): Kelompok mengendalikan penuh rantai produksi dan pemasaran secara mandiri.	Partnership (Sedang): Pengelolaan modal masih membutuhkan kemitraan intensif dengan pihak ketiga/LSM.	Placation menuju Partnership: Mulai dilibatkan dalam keputusan publik, namun dominasi input eksternal masih kuat.
Orientasi Motivasi (Coleman)	Ekonomi: Pendapatan harian cepat. Pengembangan Diri: Aktualisasi dalam manajemen bisnis kolektif.	Ekonomi: Investasi jangka panjang. Sosial: Penguatan solidaritas dan jaminan sosial komunal sesama peternak.	Pendidikan: Penguasaan teknologi tani publik. Sosial: Penembusan batas ruang patriarki sektor agraris.
Hambatan Utama	Internal: Manajemen waktu yang berbenturan dengan beban domestik harian.	Eksternal: Keterbatasan modal awal yang besar dan risiko tinggi kematian ternak.	Struktural: Dominasi kepemilikan lahan oleh laki-laki dan kuatnya bias gender kultur tani tradisional.
Respons Resisten Pemerintah Lokal	Tokenisme: Hanya diundang pameran produk tingkat kota tanpa sokongan dana kelurahan.	Non-Partisipasi: Pengabaian usulan fasilitas kesehatan dan pakan ternak kolektif.	Tokenisme: Representasi numerik formalitas dalam rapat kelurahan tanpa hak veto usulan.

Berdasarkan Tabel tersebut, terlihat bahwa ketiga kelurahan menunjukkan karakteristik pemberdayaan perempuan yang berbeda sesuai dengan sektor ekonomi yang dikembangkan, tingkat partisipasi masyarakat, orientasi motivasi, hambatan, serta respons pemerintah lokal. Kelurahan Baringin memperlihatkan tingkat pemberdayaan yang paling tinggi karena telah mencapai kategori *Citizen Control*, yang menunjukkan bahwa kelompok perempuan mampu mengendalikan secara mandiri seluruh rantai produksi dan pemasaran budidaya jamur tiram, meskipun masih menghadapi kendala internal berupa pembagian waktu antara aktivitas produktif dan tanggung jawab domestik. Sementara itu, Kelurahan Tarantang berada pada tingkat *Partnership*, yang mengindikasikan bahwa pengelolaan usaha penggemukan sapi telah melibatkan kolaborasi dengan berbagai pihak, tetapi keberlanjutan usaha masih bergantung pada dukungan modal eksternal dan menghadapi hambatan berupa tingginya kebutuhan investasi awal serta risiko kematian ternak. Berbeda dengan kedua wilayah tersebut, Kelurahan Batu Gadang masih berada pada tahap transisi dari *Placation* menuju *Partnership*, yang menunjukkan bahwa perempuan mulai memperoleh ruang dalam proses pengambilan keputusan publik, namun dominasi aktor eksternal serta struktur sosial patriarkal masih membatasi kapasitas mereka dalam sektor pertanian padi. Perbedaan orientasi motivasi juga memperlihatkan bahwa pemberdayaan tidak hanya didorong oleh faktor ekonomi, tetapi juga

oleh kebutuhan akan pengembangan diri, solidaritas sosial, dan peningkatan kapasitas pendidikan sesuai dengan karakteristik masing-masing sektor usaha. Di sisi lain, respons pemerintah lokal di ketiga kelurahan masih didominasi praktik *tokenisme* maupun *non-partisipasi*, sehingga dukungan yang diberikan cenderung bersifat simbolis dan belum mampu memperkuat keberlanjutan program pemberdayaan perempuan secara substantif. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan pemberdayaan perempuan tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat, tetapi juga oleh kemampuan mengatasi hambatan struktural dan tersedianya dukungan kelembagaan yang lebih inklusif serta berorientasi pada pemberian kewenangan nyata kepada kelompok perempuan.

Peran LSM Pembangkik Batang Tarandam (PBT) dalam Meningkatkan Partisipasi Perempuan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa LSM Pembangkik Batang Tarandam (PBT) memiliki peran sentral dalam membangun dan meningkatkan partisipasi perempuan pada Program Sekolah Perempuan di Kecamatan Lubuk Kilangan. Peran tersebut dijalankan melalui fungsi fasilitator, edukator, motivator, mediator, dan pendamping sosial. Sebagai fasilitator, LSM PBT menyediakan ruang belajar bagi perempuan melalui kegiatan pertemuan rutin, pelatihan keterampilan, serta diskusi kelompok. Ruang belajar tersebut memungkinkan perempuan untuk berbagi pengalaman dan memahami persoalan sosial yang mereka hadapi sehari-hari. Pendamping dari LSM PBT juga mendorong perempuan untuk berani menyampaikan pendapat dan terlibat aktif dalam setiap kegiatan kelompok.

Sebagai edukator, LSM PBT memberikan pendidikan kritis terkait kesetaraan gender, hak perempuan, kesehatan reproduksi, serta pengelolaan ekonomi keluarga. Materi pembelajaran disampaikan secara partisipatif dengan menggunakan pengalaman hidup anggota sebagai bahan diskusi utama. Pendekatan ini membuat anggota lebih mudah memahami materi karena berkaitan langsung dengan realitas sosial yang mereka alami. Selain itu, LSM PBT juga berperan sebagai motivator yang memberikan dorongan moral kepada anggota agar lebih percaya diri dalam mengikuti kegiatan sosial maupun ekonomi. Sebagian besar anggota mengaku bahwa sebelum mengikuti Program Sekolah Perempuan mereka merasa minder dan tidak berani berbicara di depan umum. Namun setelah mengikuti kegiatan secara rutin, mereka mulai memiliki keberanian untuk menyampaikan pendapat dan mengambil peran dalam kegiatan masyarakat.

Peran lainnya terlihat pada fungsi mediasi yang dilakukan LSM PBT antara kelompok perempuan dengan pemerintah lokal maupun Forum Nagari. Melalui mediasi tersebut, kelompok perempuan memperoleh akses terhadap berbagai program pemberdayaan dan dukungan sosial yang sebelumnya sulit dijangkau. Dalam proses pendampingan, LSM PBT tidak hanya berfokus pada pelaksanaan program ekonomi, tetapi juga membangun kesadaran kritis perempuan terhadap posisi sosial mereka dalam masyarakat. Pendampingan dilakukan secara berkelanjutan melalui kunjungan lapangan, diskusi informal, dan evaluasi rutin terhadap perkembangan kelompok.

Motivasi Perempuan Mengikuti Program Sekolah Perempuan

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa keputusan perempuan untuk mengikuti sekaligus mempertahankan keterlibatannya dalam Program Sekolah Perempuan dilatarbelakangi oleh berbagai pertimbangan yang beragam. Pertimbangan tersebut meliputi motivasi ekonomi, motivasi sosial, motivasi pendidikan, serta motivasi pengembangan diri. Di antara berbagai faktor tersebut, motivasi ekonomi muncul sebagai faktor yang paling dominan dalam mendorong partisipasi peserta pada program ini. Sebagian besar peserta berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah sehingga memandang Program Sekolah Perempuan sebagai sarana yang dapat membuka peluang untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus menambah pendapatan keluarga. Selain itu, beberapa peserta merupakan janda

maupun perempuan yang memikul tanggung jawab sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Kondisi tersebut mendorong mereka untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan ekonomi agar mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga secara lebih efektif.

Selain motivasi ekonomi, perempuan juga memiliki motivasi sosial berupa keinginan untuk memperluas relasi sosial dan memperoleh dukungan emosional dari sesama perempuan. Program Sekolah Perempuan menjadi ruang aman bagi anggota untuk berbagi pengalaman terkait persoalan rumah tangga, ekonomi, maupun relasi gender. Motivasi pendidikan juga menjadi alasan penting bagi perempuan untuk mengikuti program. Sebagian anggota mengaku memperoleh pengetahuan baru terkait hak perempuan, kesehatan reproduksi, pengelolaan keuangan keluarga, dan pentingnya partisipasi perempuan dalam pembangunan. Pengetahuan tersebut memberikan perubahan cara pandang perempuan terhadap posisi mereka dalam keluarga dan masyarakat. Sementara itu, motivasi pengembangan diri terlihat dari meningkatnya keinginan perempuan untuk lebih mandiri, percaya diri, dan aktif dalam kegiatan sosial. Program Sekolah Perempuan memberikan pengalaman baru bagi anggota untuk berbicara di depan umum, mengikuti diskusi kelompok, dan terlibat dalam pengambilan keputusan.

Hambatan Partisipasi Perempuan dalam Program Sekolah Perempuan

Meskipun partisipasi perempuan mengalami peningkatan, hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi berbagai hambatan dalam mengikuti Program Sekolah Perempuan. Hambatan tersebut berasal dari faktor internal maupun eksternal. Hambatan internal meliputi rendahnya tingkat pendidikan, rasa minder, serta keterbatasan waktu akibat beban kerja domestik yang tinggi. Sebagian anggota mengaku kesulitan membagi waktu antara mengikuti kegiatan Sekolah Perempuan dengan mengurus rumah tangga dan pekerjaan sehari-hari.

Sementara itu, hambatan eksternal berasal dari budaya patriarki, stigma sosial, serta kurangnya dukungan keluarga. Beberapa anggota mengaku pernah mendapat larangan atau kritik dari suami dan lingkungan sekitar karena dianggap terlalu aktif mengikuti kegiatan di luar rumah. Dalam masyarakat yang masih patriarkal, perempuan sering dipandang lebih pantas berada di ranah domestik dibandingkan terlibat dalam kegiatan publik. Selain itu, keterbatasan dukungan dari pemerintah lokal juga menjadi hambatan dalam pengembangan program. Bantuan yang diterima kelompok perempuan masih terbatas sehingga kegiatan pemberdayaan seringkali bergantung pada pendampingan dan dukungan dari LSM PBT.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam Program Sekolah Perempuan di Kecamatan Lubuk Kilangan tidak hanya berkembang sebagai bentuk keterlibatan yang bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan tindakan sosial yang berlandaskan pada kesadaran, pengalaman hidup, serta kebutuhan sosial dan ekonomi yang mereka hadapi. Bentuk partisipasi tersebut tampak melalui keterlibatan aktif perempuan dalam berbagai kegiatan, mulai dari proses pembelajaran, diskusi kelompok, pelaksanaan usaha ekonomi produktif, hingga keikutsertaan dalam berbagai ruang partisipasi publik di lingkungan masyarakat. Temuan ini mengindikasikan bahwa Program Sekolah Perempuan telah berkembang menjadi ruang sosial alternatif yang memungkinkan perempuan meningkatkan kapasitas diri sekaligus memperkuat posisi dan perannya dalam kehidupan sosial masyarakat.

Ditinjau dari perspektif paradigma definisi sosial, partisipasi perempuan dalam Program Sekolah Perempuan dapat dimaknai sebagai tindakan sosial yang memiliki makna subjektif bagi setiap pelakunya. Keikutsertaan perempuan dalam berbagai kegiatan tidak semata-mata didorong oleh kewajiban administratif, melainkan berangkat dari kesadaran bahwa program tersebut memberikan manfaat nyata bagi kehidupan mereka. Dalam konteks tersebut, partisipasi merupakan hasil dari proses pemaknaan sosial yang terbentuk melalui pengalaman

sehari-hari perempuan sebagai individu yang berhadapan dengan keterbatasan ekonomi, subordinasi gender, serta terbatasnya akses terhadap ruang publik. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Max Weber yang menempatkan tindakan sosial sebagai perilaku yang memiliki makna subjektif bagi individu yang melaksanakannya. Temuan penelitian ini juga selaras dengan hasil penelitian Pasciana et al. (2025), yang menjelaskan bahwa pemberdayaan perempuan berbasis komunitas tidak hanya menghasilkan perubahan dalam aspek ekonomi, tetapi juga mendorong terjadinya transformasi sosial melalui penguatan kapasitas serta peningkatan kesadaran perempuan dalam kehidupan bermasyarakat.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Program Sekolah Perempuan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemberdayaan ekonomi, tetapi juga menjadi media transformasi sosial bagi perempuan. Sebelum mengikuti program, sebagian besar perempuan cenderung membatasi aktivitasnya pada ranah domestik dan merasa belum memiliki kemampuan untuk terlibat dalam berbagai kegiatan publik. Setelah mengikuti program secara berkelanjutan, perempuan mulai memperlihatkan perubahan sikap yang ditandai dengan meningkatnya keberanian untuk berbicara, kemampuan menyampaikan pendapat, serta keterlibatan yang lebih aktif dalam berbagai forum sosial di masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan tidak hanya berorientasi pada peningkatan keterampilan ekonomi, tetapi juga mencakup berkembangnya kesadaran kritis serta menguatnya identitas sosial perempuan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Hidayatulloh (2024) yang menegaskan bahwa Sekolah Perempuan berfungsi sebagai media transformasi sosial yang mampu mendorong tumbuhnya keberanian perempuan untuk berpartisipasi dalam ruang publik maupun berbagai aktivitas sosial di lingkungan masyarakat.

Hasil penelitian ini turut memperkuat temuan Septiani (2015) yang menjelaskan bahwa Sekolah Perempuan berperan sebagai ruang pendidikan alternatif bagi perempuan akar rumput untuk membangun kesadaran kritis terhadap berbagai bentuk ketidakadilan gender. Temuan yang sejalan juga dikemukakan oleh Misiyah dan Kalsum (2017), yang menyatakan bahwa Sekolah Perempuan mampu meningkatkan kapasitas kepemimpinan perempuan melalui pendekatan pembelajaran yang bersifat partisipatif. Dalam penelitian ini, proses pembelajaran yang berlangsung melalui diskusi kelompok, berbagi pengalaman hidup, serta pelatihan keterampilan terbukti mendorong perempuan untuk lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan, baik di tingkat kelompok maupun dalam kehidupan sosialnya. Temuan tersebut selaras dengan penelitian Nurlatifah et al. (2020) yang menjelaskan bahwa proses pemberdayaan dalam Program Sekoper Cinta dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif dengan menempatkan perempuan sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran sekaligus sebagai agen perubahan sosial.

Apabila dianalisis menggunakan Teori Tangga Partisipasi yang dikemukakan oleh Sherry R. Arnstein, tingkat partisipasi perempuan dalam Program Sekolah Perempuan menunjukkan kecenderungan ke arah bentuk partisipasi yang semakin aktif. Arnstein (1969) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat terdiri atas beberapa tingkatan, mulai dari manipulasi hingga kontrol warga (*citizen control*). Berdasarkan hasil penelitian, tingkat partisipasi perempuan dalam Program Sekolah Perempuan berada pada kategori *placation* dan *partnership*. Pada tahapan tersebut, perempuan tidak lagi hanya ditempatkan sebagai objek pelaksanaan program, tetapi telah memperoleh ruang untuk menyampaikan aspirasi serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat kelompok. Meskipun demikian, lembaga pendamping masih memegang peranan yang cukup dominan dalam menentukan arah maupun keberlanjutan program. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa partisipasi perempuan telah berkembang menuju bentuk partisipasi yang lebih substantif, meskipun belum sepenuhnya mencapai tingkat kontrol penuh oleh masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Nurita et al. (2025) yang menunjukkan bahwa Program Sekolah Perempuan mampu meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan serta pembangunan masyarakat berbasis komunitas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam Program Sekolah Perempuan di Kecamatan Lubuk Kilangan berkembang sebagai suatu proses sosial yang bersifat partisipatif sekaligus transformatif. Partisipasi tersebut tidak hanya tercermin dari keterlibatan perempuan dalam berbagai kegiatan program, tetapi juga dari meningkatnya keberanian untuk berpartisipasi dalam ruang publik, terlibat dalam pengambilan keputusan di tingkat kelompok, serta menjalankan berbagai aktivitas ekonomi produktif. Dalam proses tersebut, LSM Pembangkik Batang Tarandam (PBT) memegang peran yang signifikan melalui pendekatan pendampingan partisipatif yang menempatkan perempuan sebagai subjek utama dalam proses pemberdayaan. Melalui pendidikan gender, diskusi kelompok, dan penguatan kapasitas ekonomi, perempuan didorong untuk mengembangkan kesadaran kritis, meningkatkan rasa percaya diri, serta memperkuat kemampuan berorganisasi secara mandiri.

Penelitian ini juga menemukan bahwa partisipasi perempuan dipengaruhi oleh motivasi ekonomi, sosial, dan kebutuhan aktualisasi diri, di mana perempuan melihat program sebagai ruang untuk memperoleh keterampilan, dukungan sosial, dan peluang meningkatkan kesejahteraan keluarga. Namun demikian, partisipasi tersebut masih menghadapi hambatan struktural dan kultural seperti budaya patriarki, beban domestik, stigma sosial, dan rendahnya respons pemerintah lokal terhadap aspirasi perempuan. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat paradigma definisi sosial serta menunjukkan bahwa teori partisipasi Arnstein dan teori pilihan rasional Coleman dapat digunakan secara saling melengkapi dalam memahami dinamika partisipasi perempuan dalam program pemberdayaan berbasis komunitas. Oleh karena itu, diperlukan dukungan pemerintah yang lebih inklusif, penguatan advokasi LSM, dan peningkatan kapasitas kelompok perempuan agar keberlanjutan pemberdayaan dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dipertimbangkan dalam memahami temuan secara lebih komprehensif. Pertama, penelitian berfokus pada Program Sekolah Perempuan di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang sehingga konteks sosial, budaya, dan kelembagaan yang ditemukan memiliki karakteristik yang spesifik dan belum dapat digeneralisasikan secara langsung pada program pemberdayaan perempuan di wilayah lain. Kedua, penelitian lebih menitikberatkan pada pengalaman, bentuk partisipasi, serta proses pemberdayaan perempuan dalam program, sehingga belum mengukur secara kuantitatif perubahan kesejahteraan ekonomi, peningkatan kapasitas, maupun keberlanjutan partisipasi dalam jangka panjang. Ketiga, keterlibatan LSM Pembangkik Batang Tarandam (PBT) sebagai aktor pendamping menjadi konteks penting dalam penelitian, sementara perspektif pemerintah lokal dan pemangku kepentingan eksternal belum dieksplorasi secara mendalam. Selain itu, hambatan seperti budaya patriarki, beban domestik, stigma sosial, dan rendahnya respons pemerintah terhadap aspirasi perempuan menunjukkan bahwa dinamika pemberdayaan masih dipengaruhi oleh faktor struktural dan kultural yang kompleks.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, pemerintah daerah perlu memperkuat dukungan kelembagaan terhadap Program Sekolah Perempuan melalui kebijakan yang lebih responsif gender, penyediaan akses terhadap sumber daya, serta mekanisme partisipasi yang memungkinkan aspirasi perempuan terintegrasi dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan di tingkat lokal. LSM Pembangkik Batang Tarandam (PBT) dan kelompok perempuan juga perlu mempertahankan pendekatan pendampingan partisipatif dengan memperluas pendidikan gender, penguatan kapasitas organisasi, pengembangan keterampilan ekonomi produktif, serta advokasi hak dan kepentingan perempuan agar

partisipasi tidak berhenti pada keterlibatan dalam kegiatan program, tetapi berkembang menjadi kemampuan memengaruhi keputusan publik. Bagi kelompok perempuan, peningkatan kemandirian, solidaritas, dan jejaring sosial perlu terus dikembangkan untuk menghadapi hambatan kultural dan domestik yang membatasi partisipasi. Penelitian selanjutnya disarankan melibatkan wilayah dan kelompok perempuan yang lebih beragam, menggunakan pendekatan longitudinal atau kombinasi metode kualitatif dan kuantitatif, serta mengkaji secara lebih mendalam hubungan antara partisipasi, pendidikan nonformal, peningkatan kapasitas, kemandirian ekonomi, dan perubahan posisi perempuan dalam keluarga maupun masyarakat.

Kontribusi Author

Kontribusi penelitian ini terletak pada upaya memberikan pemahaman empiris mengenai partisipasi perempuan sebagai proses sosial yang tidak hanya berorientasi pada keterlibatan dalam kegiatan pemberdayaan, tetapi juga mencakup perubahan kapasitas, keberanian memasuki ruang publik, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, dan pengembangan aktivitas ekonomi produktif. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan memperlihatkan bahwa paradigma definisi sosial dapat digunakan untuk memahami makna partisipasi dari perspektif perempuan, sementara teori partisipasi Arnstein dan teori pilihan rasional Coleman dapat dipadukan untuk menjelaskan tingkatan keterlibatan serta pertimbangan rasional yang melandasi keputusan perempuan dalam mengikuti program. Secara praktis, penelitian memberikan masukan bagi pemerintah daerah, LSM, dan pengelola program pemberdayaan untuk merancang pendidikan dan pendampingan yang lebih partisipatif, responsif gender, dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya kajian pendidikan nonformal dan ilmu sosial melalui penempatan Program Sekolah Perempuan sebagai ruang pembelajaran, penguatan kapasitas, dan transformasi sosial perempuan berbasis komunitas.

REFERENSI

- Adebayo, A. D., & Butcher, J. (2022). Community empowerment in Nigeria's tourism industry: An analysis of stakeholders' perceptions. *Tourism Planning and Development*, 19(1), 1–21. <https://doi.org/10.1080/21568316.2022.2048583>
- Baral, S., Tiwari, S., & Shrestha, K. K. (2024). Gendered process of women (dis)empowerment in the community forestry in Nepal. *Journal of Forest and Livelihood*, 24(1). <https://nepjol.info/index.php/JFL/article/view/72006/54959>
- Cholifah, N. (2025). Penerapan interactive planning dalam pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan desa mandiri di Kabupaten Sidoarjo. *JURMIE (Jurnal Risiko, Manajemen, dan Inovasi Ekonomi)*, 2(6). <https://journal.hasbaedukasi.co.id/index.php/jurmie/article/download/489/465>
- Chotim, E. E. (2020). Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di Indonesia: Keinginan dan keniscayaan pendekatan pragmatis (Studi terhadap UKM Cirebon home made). *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, 2(1), 70–82. <https://doi.org/10.54783/jin.v2i1.357>
- Dushkova, D., & Ivlieva, O. (2024). Empowering communities to act for a change: A review of the community empowerment programs towards sustainability and resilience. *Sustainability*, 16(19), 8700. <https://doi.org/10.3390/su16198700>
- Hidayatulloh, M. S. (2024). Peran Sekolah Perempuan dalam upaya pemberdayaan perempuan. *BUDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(3).
- Ibrahim, M. (2025). Sekolah Perempuan Hebat sebagai upaya memperkuat ketahanan ekonomi keluarga melalui pemberdayaan perempuan pengolahan butternut squash. *Jurnal Abdimas Sejahtera (JAS)*, 6(1). <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/jas/article/view/1194>
- Marofah, S. (2023). Pemberdayaan perempuan melalui program Sekolah Perempuan di Desa

- Kesamben Kulon Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik. *Publika*, 11(1), 1475–1488.
- Marsuki, N. R., Nursida, A., & Maemunah, M. (2026). Community empowerment model through integrative social capacitation in the development of Bissoloro Tourism Village, Gowa Regency. *Priviet Social Sciences Journal*, 6(2), 448-457. <https://doi.org/10.55942/pssj.v6i2.1537>
- Muminah, S., & Suprajogo, T. (2025). Implementasi kebijakan pembangunan daerah melalui pendekatan bottom-up. *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 8(4), 1485-1495. <https://ojs pustek.org/index.php/SJR/article/download/1253/868/2937>
- Mustanir, A., Sellang, K., Adnan, A. A., & Lubis, S. (2025). Tracing the Evolution of Community Empowerment Models in Development Planning. *Jurnal Sosiologi Pendidikan*, 18(1), 1–15. <https://doi.org/10.22146/jsp.99202>
- Najamudin, F., & Al Fajar, H. (2024). Pemberdayaan masyarakat berbasis sumber daya lokal melalui pendekatan ABCD untuk mencapai SDG 1: Tanpa kemiskinan. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 7(2), 142-158. <https://doi.org/10.24198/focus.v7i2.58936>
- Nafisyah, A. F., & Nugraheni, N. (2024). Pemberdayaan masyarakat lokal sebagai katalisator untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. *Jurnal ASAS*, 2(1). <https://asas-ins.com/index.php/jas/article/download/72/57>
- Nugroho, S. P., Handayani, S., & Wijayanti, T. (2024). Tokenism in local governance: Deconstructing women's participation ladder in rural empowerment programs. *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 16(1), 89-102. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v16i1.43211>
- Nurita, D. A., Murti, I., & Radjikan. (2025). Pemberdayaan perempuan melalui program Sekolah Perempuan (Sekoper) untuk kesetaraan dan partisipasi dalam pembangunan di Desa Kramatinggil Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 176–182. <https://doi.org/10.69957/praob.v5i02.2191>
- Nurlatifah, D., Sumpena, D., & Hilman, F. A. (2020). Proses pemberdayaan perempuan pada program Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita (Sekoper Cinta). *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies*, 1(1), 35–45. <https://doi.org/10.15575/azzahra.v1i1.9463>
- Pasciana, R., Karmila, M., Iriany, I. S., Juliasih, L., & Febrina, R. I. (2025). Developing women-friendly and child-caring villages in Indonesia: Pengembangan kapasitas dan pemberdayaan perempuan. *Journal of Lifestyle and SDGs Review*, 5(2), e03165–e03165.
- Perwirawati, E., Sihombing, B., & Simamora, P. R. T. (2022). Perencanaan komunikasi pariwisata dalam pemberdayaan masyarakat desa Hilisataro Nandisa menuju desa wisata berbasis sustainable tourism development. *Jurnal Darma Agung*, 30(2), 321–338.
- Pratama, A. R., & Safitri, D. (2023). Dinamika pilihan rasional dan partisipasi semu perempuan dalam pembangunan desa berbasis komunitas. *Jurnal Sosiologi Kontemporer*, 11(2), 145-158. <https://doi.org/10.26740/jss.v11n2.p145-158>
- Ramli, R., Sulvinajayanti, S., Saleh, A. A., & Tajuddin, F. N. (2023). Making a partnership-based corporate social responsibility: PT UPC Sidrap Bayu Energi's strategy to sustainable community empowerment. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan*, 7(2), 157–170. <https://doi.org/10.14421/jpm.2023.072-04>
- Sa'adah, N. H. (2022). Perbedaan Gender dalam Memilih Lembaga Pendidikan Ditinjau dari Teori Pilihan Rasional James S. Coleman. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 17(2), 223–236.
- Siregar, N. D. (2026). Patriarchy and education: Challenges faced by women in patriarchal

- societies. *Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1).
<https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/mujtama/article/view/22471>
- Walters, E., Findlay, G., Curtis-Tyler, K., & Harden, A. (2023). Embedding community development approaches in local systems to address health inequalities: A scoping review. *Community Development Journal*, 58(4), 699–718.
<https://doi.org/10.1093/cdj/bsad017>
- Zirtana, H., Baiquni, M., & Sudrajat. (2025). Pengaruh ketimpangan sosial ekonomi terhadap kemiskinan di daerah tertinggal Indonesia: Analisis data panel 2015–2021. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 16(1). <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v16i1.3260>